

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam hal Pengadilan Negeri juga berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap larangan praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat dan untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum putusan serta merta yang dijatuhkan oleh KPPU dalam menangani kasus praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat serta untuk mengetahui apakah pihak yang dirugikan atas tindakan pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam hal KPPU menetapkan pembayaran ganti rugi yang tidak memuaskan.

Penelitian mengenai kekuatan hukum putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam hal terjadinya praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat merupakan penelitian hukum normatif, didukung dengan data lapangan yang diperoleh dari wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

Berdasarkan penelitian : Kedudukan putusan administratif yang dijatuhkan oleh kppu dalam hal Pengadilan Negeri juga berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran larangan praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat mengingat KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah sebagai berikut : Pengadilan Negeri menguatkan sanksi administratif yang telah dijatuhkan oleh KPPU tersebut tanpa menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan, Pengadilan Negeri menguatkan sanksi administratif yang telah dijatuhkan oleh KPPU dan sekaligus menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan. Putusan KPPU yang mengharuskan pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat untuk membayar denda dan terhadap keterlambatan pembayaran denda tersebut dikenakan denda keterlambatan yang harus dibayarkan meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta) batal demi hukum. Bagi pihak yang dirugikan atas tindakan pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat berwenang untuk mengajukan gugatan berupa penetapan ganti rugi ke Pengadilan Negeri dalam hal KPPU menetapkan pembayaran ganti rugi yang tidak memuaskan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Putusan KPPU, Praktek Monopoli/Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRACT

This research aims to study the status of a decision made by the KPPU when at the same time the Court of First Instance also declares that a violation against the prohibition of monopolistic practices/unfair business competition has been committed, to find out the legal force of the decision made by the KPPU in handling a case of monopolistic practice/unfair business competition, and to know whether a certain party suffering from monopolistic practices committed by a certain business practitioner can file a law suit to the Court of First Instance, especially when the amount of compensation stipulated in the KPPU decision is unsatisfactory.

This is a juridical normative research supported with the primary data obtained from the field through interviews. The data are analyzed qualitatively using a descriptive method.

The research finds that the status of an administrative decision issued by the KPPU, when at the same time the Court of First Instance also finds a violation against the prohibition of monopolistic practice/unfair business competition in that particular conduct, is as the following. The decision is strengthened by the decision issued by the Court of First Instance which does not give any basic punishment nor additional punishment, or it is strengthened by the decision of the Court of First Instance which gives a basic punishment and additional punishment. The KPPU decision forces the business practitioner who is found guilty for having committed a monopolistic practice/unfair business competition to pay a fine. When the payment is overdue, he will be charged with another amount of compensatory payment although there is a legal attempt (simultaneous decision) being made to revoke the first decision. Based on the article 1365 of the Civil Code, the party suffering from a monopolistic practice/unfair business competition can file a complaint to the Court of First Instance by appealing for a more satisfying compensation when the amount decided by the KPPU is considered unsatisfactory.

Keywords: Legal force, KPPU decision, Monopolistic Practices/Unfair Business Competition.